

**SINKRONISASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas



Disusun oleh:

**FAUZI AULIA RAHMAN
NIM. 1820112042**

Komisi Pembimbing:

PROF. DR. YASWIRMAN, MA.

DR. DAHLIL MARJON, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**

**SINKRONISASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**(Fauzi Aulia Rahman, Nim 1820112042, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 136 halaman)**

ABSTRAK

Konsep “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam memberikan dispensasi kawin menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan di usia anak bukan untuk mempermudah dispensasi kawin. Pembuktian “alasan sangat mendesak” ini menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Disisi lain, Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan, yaitu: bagaimana pengaturan Dispensasi Kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrin. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum memberikan kejelasan mengenai kriteria alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup dalam penetapan permohonan dispensasi kawin. Sehingga, diterima atau tidaknya permohonan dispensasi kawin tergantung sepenuhnya kepada hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin akan menghadapi dua kemudharatan, yakni adanya perkawinan usia dini apabila permohonan dikabulkan dan kemudharatan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Alasan Sangat Mendesak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

**SYNCHRONIZATION OF ARTICLE 7 PARAGRAPH (2) LAW NUMBER
16 OF 2019 REGARDING AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 OF 1974
REGARDING MARRIAGE WITH REGULATION OF THE SUPREME
COURT NUMBER 5 OF 2019 REGARDING GUIDELINES FOR
ADJUDICATING APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION**

**(Fauzi Aulia Rahman, Nim 1820112042, Master of Law Study Program, Faculty
of Law, Andalas University, 2022, 136 pages).**

ABSTRACT

The concept of "very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence" in granting dispensation for marriage according to Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage aims to prevent marriage at a young age not to facilitate the dispensation of marriage. On the other hand, Indonesia is a state party to the Convention on the Rights of the Child affirms that all actions concerning children carried out by social welfare institutions, state or private, courts, administrative authorities or legislative bodies, are carried out in the best interest of the child. In the context of marital dispensation, the best interests of the child are explicitly formulated in supreme court regulation number 5 of 2019 Regarding Guidelines for Adjudicating Applications for marriage Dispensation. This research will answer two problems, namely: how is the regulation of Marriage Dispensation in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and what are the Judge's considerations in determining the marriage dispensation. The research method used is normative legal research or doctrinal legal research. This study uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials is carried out using a statute approach and a case approach. The results of this study indicate that the presence of Perma Number 5 of 2019 has not provided clarity regarding the criteria for very urgent reasons and sufficient evidence in determining the application for marriage dispensation. Thus, whether or not the marriage dispensation application is accepted depends entirely on the judge in his legal considerations. Judges in adjudicating applications for marriage dispensation will face two disadvantages, namely the existence of early marriage if the application is granted and the harm that will occur if the application is rejected. This is where the role of the judge in *rechtsvinding* is needed to be able to determine the request for dispensation of marriage on the basis of the best interests of the child.

Keywords: Marriage Dispensation, Very Urgent Reasons, Best Interests for Children